

BAB II

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1 Penelitian Terdahulu

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bale, Marlina, Muanas, and Fahmie (2023), yang berjudul “Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi kasus pada pemerintah daerah Kota Kupang)”. Hasil penelitian menunjukkan sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Kupang karena Sistem informasi memiliki Nilai t hitung $1,341 < \text{nilai } t \text{ tabel } 1,668$. Nilai signifikansi dari sistem informasi akuntansi adalah $0,184$. Nilai tersebut lebih besar dari $0,05$. Sedangkan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Kupang karena Sistem pengendalian internal memiliki Nilai t hitung $3,754 > \text{nilai } t \text{ tabel } 1,668$. Nilai signifikansi dari sistem pengendalian internal adalah $< 0,001$, dan nilai tersebut lebih kecil dari $0,0$.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lumuly and Atarwaman (2024), yang berjudul “Pengaruh Implementasi dan Efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ambon (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Ambon)”. Hasil penelitian ini Implementasi Sistem

Informasi Pemerintahan Daerah (ISIPD) tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan (KLK). Hal ini berdasarkan perbandingan nilai hitung dan tabel, yang dimana t hitung lebih kecil dari nilai t tabel (1,6100,05). Sementara itu, efektivitas sistem informasi pemerintahan daerah terhadap kualitas laporan keuangan di organisasi perangkat daerah (OPD) di kota ambon berdasarkan perbandingan nilai hitung dan nilai tabel, yang dimana t hitung lebih besar dari nilai t tabel ($8,613 > 5,8044$) dan nilai signifikan lebih kecil dari nilai alpha 0,05 ($0,00 < 0,05$) dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (ESIPD) berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mustaqmah and Putri (2022), yang berjudul “Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia serta pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, Sistem Informasi Manajemen Daerah tidak memberikan pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Bukit Tinggi.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gustina (2021), yang berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Penerapan Sistem Akuntansi

Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir. Sementara itu, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memiliki pengaruh parsial terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,349 menunjukkan bahwa 34,9% variabilitas dalam kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dengan kontribusi sebesar 47,1%.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kusnadi, Oemar, and Supeno (2022), yang berjudul “Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah, teknologi informasi dan pengendalian internal keuangan daerah secara parsial maupun simultan, berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut berdasarkan hasil uji hipotesis dari masing-masing variabel.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewi, Sasanti, and Kartikasari (2023), yang berjudul “Pengaruh Pengelolaan Keuangan dan Pemahaman Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan mempunyai hubungan positif tetapi tidak berpengaruh signifikan

terhadap kualitas laporan keuangan dan pemahaman SIPD berpengaruh positif serta signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Paat and Saleh (2023), yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Cimahi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Informasi Pemerintah Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini berdasarkan pemerintah Kota Cimahi setelah mengimplementasikan SIPD tersebut mengalami peningkatan terhadap kualitas laporan keuangan yang ditandai dengan proses administrasi yang lebih baik dibandingkan sebelumnya dan laporan keuangan dapat disajikan secara tepat waktu.

2.2 Teori Stewardship (*Stewardship Theory*)

Stewardship Theory pertama kali dicetuskan oleh Donaldson and Davis (1991) yang dimana didalam teori stewardship memiliki akar psikologis yang dirancang untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai steward akan bertindak untuk kepentingan pemilik. Dalam teori stewardship, manajer akan berperilaku sesuai dengan kepentingan bersama dikarenakan steward merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena steward lebih melihat pada upaya pencapaian

tujuan organisasi (Donaldson & Davis, 1991). Implikasi *Teori Stewardship* dalam penelitian ini adalah mampu menjelaskan keberadaan pemerintah daerah sebagai lembaga yang dapat dipercaya, memberikan pelayanan yang optimal kepada publik, menampung aspirasi masyarakat, serta menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan amanah yang diterima. Hal ini, bertujuan agar ekonomi dapat tercapai, dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara maksimal yang diamanahkan kepada pemerintah daerah (Indrayani & Widiastuti, 2020).

2.3 Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah sebuah platform yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 391, yang mewajibkan pemerintah daerah untuk mengelola dan menyediakan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan secara sistematis. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, SIPD semakin diperkuat dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah. Sistem ini berperan dalam mengintegrasikan berbagai data, termasuk perencanaan pembangunan, pengelolaan anggaran daerah, pembinaan serta pengawasan instansi, dan informasi lain yang mendukung tata kelola pemerintahan daerah secara efektif (Arw, 2024).

Menurut Alfani dan Nasution, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dirancang oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bertujuan

untuk memastikan bahwa semua tahapan penataan dokumen rencana daerah sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa SIPD tidak hanya berperan sebagai alat teknologi informasi semata, tetapi juga sebagai bagian integral dari proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan dalam pemerintahan daerah (Alfani & Nasution, 2022).

Selain itu, berdasarkan kesimpulan dari Bustanuddin, penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara profesional di berbagai aspek pemerintahan daerah memastikan bahwa proses-proses administrasi menjadi lebih terstruktur, akurat, dan sesuai standar. SIPD membantu meningkatkan efisiensi administrasi, transparansi pengelolaan keuangan publik, serta akuntabilitas dalam pelaporan dan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Dengan demikian, penggunaan SIPD bukan hanya sekadar kewajiban administratif, tetapi juga strategi untuk mencapai pemerintahan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Bustanuddin, Yamin, & Zulkieflimansyah, 2023).

Adapun indikator dalam SIPD terdiri dari beberapa indikator utama, antara lain :

a. Perencanaan dan Penganggaran

Perencanaan dan penganggaran merupakan elemen penting dalam tata kelola pemerintahan daerah, yang bertujuan untuk memastikan penggunaan sumber daya publik dilakukan secara efisien, efektif, dan transparan. Pemerintah daerah diwajibkan menyusun anggaran

berdasarkan kebutuhan prioritas pembangunan dan pelayanan masyarakat yang telah dirumuskan dalam rencana kerja tahunan (Walean, Mantiri, & Pati, 2021). Proses ini melibatkan identifikasi program, kegiatan, dan target yang spesifik serta pengalokasian anggaran yang terukur untuk setiap sektor. Dengan demikian, anggaran tidak hanya menjadi alat alokasi keuangan, tetapi juga sebagai instrumen kontrol untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan. Perencanaan yang matang dan penganggaran yang tepat juga memungkinkan pemerintah daerah untuk mengantisipasi potensi risiko serta meningkatkan akuntabilitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam hal ini pemerintah daerah diharuskan untuk menyusun anggaran yang terencana dan diukur dalam satu periode atau tahun (Akhmad, Mustanir, & Ramadhan, 2017).

b. Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan anggaran merupakan tahap krusial dalam siklus keuangan daerah, di mana program dan kegiatan yang telah direncanakan diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anggaran yang telah dialokasikan direalisasikan sesuai dengan peruntukannya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemantauan realisasi anggaran secara aktual menjadi hal yang sangat penting untuk mengidentifikasi progres pelaksanaan kegiatan, mengukur efisiensi penggunaan dana, dan

memastikan tidak terjadi penyimpangan atau pemborosan (Wibowo & Ali, 2024). Selain itu, pelaksanaan anggaran yang diawasi secara berkala dapat memberikan ruang untuk melakukan penyesuaian jika diperlukan, terutama apabila terdapat dinamika kondisi yang memengaruhi capaian target. Dengan demikian, pelaksanaan anggaran yang transparan dan akuntabel dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang telah dirumuskan sebelumnya (Angelina, 2022).

c. Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan merupakan bagian akhir yang sangat penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah diwajibkan untuk menyajikan informasi keuangan yang relevan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan ini mencakup laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan yang memberikan penjelasan rinci terkait penggunaan dana publik. Penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAP bertujuan untuk memastikan bahwa laporan tersebut dapat diandalkan oleh semua pihak, termasuk pemerintah pusat, lembaga pengawas, dan masyarakat. Pelaporan yang baik juga menjadi indikator akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya publik. Selain itu, pelaporan keuangan yang tepat waktu dan sesuai standar mempermudah proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan meningkatkan

kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah (Putra & Varina, 2021).

d. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan penting yang dilakukan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah harus secara berkala memantau kinerja keuangan dan realisasi anggaran, baik dari segi efektivitas, efisiensi, maupun pencapaian target yang ada. Melalui proses monitoring, pemerintah dapat mengidentifikasi hambatan atau penyimpangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan anggaran, sehingga langkah-langkah perbaikan atau penyesuaian bisa segera diambil. Evaluasi atas realisasi anggaran bertujuan untuk menilai apakah program dan kegiatan yang dibiayai oleh anggaran telah memberikan hasil yang optimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, hasil evaluasi ini juga menjadi bahan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pihak terkait, seperti DPRD dan lembaga pengawas, serta sebagai dasar untuk perbaikan perencanaan anggaran pada periode berikutnya. Dengan monitoring dan evaluasi yang baik, pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan serta menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana publik (Priskila & Hukom, 2023).

2.4 Pengendalian Internal

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pengendalian Internal Pemerintah menjelaskan bahwa pengendalian internal adalah proses berkelanjutan yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa organisasi dapat mencapai tujuannya melalui kegiatan yang efektif dan efisien, laporan keuangan yang andal, pengamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan. Singkatnya, pengendalian internal bertujuan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pemerintahan, keandalan laporan keuangan, keamanan aset, dan kepatuhan hukum (Mulyati, Faridah, & Prawiranegara, 2020). Indikator Pengendalian Internal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pengendalian Internal Pemerintah terdiri dari lima indikator, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan pengendalian internal. Kelima indikator sistem pengendalian internal tersebut merupakan unsur yang terjalin erat satu dengan yang lainnya dengan memiliki sub indikatornya masing-masing (Triono & Dewi, 2020).

Selain itu, pengawasan internal berperan penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Pengawasan ini mencakup berbagai proses seperti audit, peninjauan, evaluasi, pemantauan, serta pengawasan lainnya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa setiap kegiatan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan,

dengan cara yang efektif dan efisien, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik good governance (Rahman & Rachman, 2021).

Adapun indikator pengendalian internal berdasarkan kerangka kerja COSO (Committee of Sponsoring Organizations), sebagai berikut :

a. Lingkungan Pengendalian

Komponen pengendalian internal merupakan komponen fundamental dalam kerangka kerja pengendalian internal yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai tujuan mereka dengan cara yang efektif dan efisien. Lingkungan pengendalian menciptakan suasana yang mendukung pengendalian di seluruh organisasi dan mempengaruhi kesadaran pegawai tentang pentingnya pengendalian.

b. Penilaian Resiko

Penilaian Resiko proses dinamis dan interaktif yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menilai risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Risiko didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa suatu peristiwa akan terjadi dan berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan tersebut. Dengan demikian, penilaian risiko menjadi dasar bagi organisasi untuk mengelola risiko secara efektif dan memastikan pencapaian tujuan yang telah ditetapkanyaitu kejadian yang menimbulkan dampak (impact) dan kemungkinan terjadinya kejadian tersebut (likelihood).

c. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memastikan bahwa respons terhadap risiko yang dipilih dilaksanakan dengan efektif. Selain itu, aktivitas ini juga dapat mendukung respons risiko lainnya untuk mengurangi potensi risiko yang ada. Setiap organisasi menerapkan aktivitas pengendalian di berbagai fungsi dan tingkatannya. Aktivitas tersebut dikelompokkan berdasarkan berbagai kriteria, termasuk area kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan proses manajemen, serta aktivitas yang bersifat manual, terkomputerisasi, atau detektif

d. Informasi dan Komunikasi

Organisasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan. Agar dapat berfungsi dengan baik, organisasi memerlukan informasi yang akurat dan relevan. Informasi ini harus disajikan pada waktu yang tepat agar dapat diidentifikasi dan dikomunikasikan secara efektif. Selain itu, informasi yang konsisten dan efisien juga penting untuk mengelola dan merespons risiko yang mungkin timbul.

Komunikasi yang efektif sangat penting bagi organisasi. Pesan yang disampaikan oleh pimpinan harus jelas dan mudah dipahami agar seluruh pegawai termotivasi dan bertanggung jawab dalam mengelola risiko. Komunikasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti email, manual kebijakan, video, atau buletin organisasi. Kejelasan pesan

dipengaruhi oleh cara penyampaiannya, baik melalui kata-kata, nada suara, maupun bahasa tubuh.

e. Pemantauan

Dalam hal ini lebih kearah mengevaluasi efektivitas pengendalian internal yang dilakukan secara berkala. Selain itu, untuk memastikan keberadaan resiko dan mengetahui komponen-komponennya memadai dan berfungsi setiap saat, maka diperlukan penerapan manajemen resiko (ERM) yang dipantau dan dimonitor terus-menerus. Monitoring dapat dilakukan dari berbagai bentuk, yaitu: penilaian terpisah (separate evaluation), monitoring terus-menerus (ongoing), atau kombinasi diantara keduanya.

2.5 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, memberikan pengertian laporan keuangan adalah “Laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Kualitas” adalah “tingkat baik buruknya sesuatu kadar derajat atau taraf (kepandaian, kecakapan, dan sebagainya) atau mutu. Jadi kualitas laporan keuangan adalah “derajat atau mutu laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan

transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan yakni pemerintah daerah dalam periode satu tahun (Defitri, 2018).

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang baik (good governance) tidak hanya ditentukan oleh akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan supremasi hukum. Faktor-faktor lain seperti daya tanggap, efektivitas, kesetaraan berbasis konsensus, efisiensi, dan visi strategis juga berperan penting. Hal ini sejalan dengan karakteristik good governance menurut UNDP dan Bank Dunia. Kualitas pelaporan pemerintah daerah bervariasi di tingkat nasional, daerah, atau kota karena dipengaruhi oleh banyak faktor (Abdallah & Ramadhani, 2022).

Adapun indikator dalam mengukur kualitas laporan keuangan, meliputi :

a. Relevansi

Laporan keuangan yang berkualitas menyajikan informasi yang bermanfaat bagi penggunanya dalam mengambil keputusan. Informasi ini relevan untuk mengevaluasi kejadian di masa kini maupun masa lalu, serta memprediksi dampaknya di masa depan. Selain itu, laporan keuangan juga membantu mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Dengan demikian, informasi dalam laporan keuangan harus relevan dengan kebutuhan penggunanya.

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan dapat dipercaya dan bebas dari kesalahan material. Laporan keuangan harus menggambarkan situasi

ekonomi yang sebenarnya dengan mengedepankan penyajian yang baik, jujur, hati-hati, serta kelengkapan informasi yang relevan agar dapat diverifikasi. Jika informasi yang disajikan tidak dapat diandalkan atau menyesatkan, maka informasi tersebut tidak dapat dikatakan andal.

c. Dapat Dipahami

Laporan keuangan harus disajikan dengan bahasa dan format yang mudah dipahami oleh penggunanya. Oleh karena itu, laporan keuangan harus menggunakan istilah dan bentuk yang sesuai dengan tingkat pemahaman pengguna. Pengguna laporan keuangan diharapkan memiliki pengetahuan yang cukup tentang lingkungan dan kegiatan operasional entitas pelaporan, serta bersedia untuk mempelajari informasi yang disajikan

d. Dapat Dibandingkan

Kualitas laporan keuangan dapat dinilai dari informasi yang disajikan. Informasi tersebut akan lebih berguna jika dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau entitas lain. Perbandingan dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Perbandingan eksternal dilakukan dengan membandingkan entitas lain dan kebijakan akuntansi yang diterapkan, sedangkan perbandingan internal dilakukan jika kebijakan akuntansi yang diterapkan sama dari tahun ke tahun. Perubahan kebijakan akuntansi yang lebih baik, misalnya mengikuti standar pemerintah, juga perlu diungkapkan dalam laporan keuangan

2.6 Pengembangan Hipotesis

1) Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam teori stewardship, bagi prinsipal (pemerintah) dengan adanya SIPD dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dengan SIPD diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah untuk mencapai tujuan dan dapat menyajikan laporan keuangan dengan tepat waktu dan dapat menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik yang membutuhkan.

Dalam penelitian oleh Hendri and Erinos (2020) serta Yulianda, Lubis, and Azhar (2022) mendukung bahwa penerapan SIPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Hal ini berdasarkan analisis hasil uji t yang memperoleh nilai signifikan $t_{0,022} < 0,05$ pada penelitian tersebut.

Maka dari itu, SIPD tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga mendukung penyusunan laporan keuangan yang lebih akurat dan tepat waktu sehingga dalam penerapan sistem informasi pemerintah daerah akan berjalan efektif dan dapat meningkatkan kualitas informasi dalam laporan keuangan

pemerintah daerah. Maka, dalam penelitian ini hipotesis yang dapat disampaikan bahwa :

H_1 = Penerapan sistem informasi pemerintahan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2) Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Teori stewardship mengatakan bahwa sifat seseorang dapat berlaku jujur kepada orang lain, dapat dipercaya, dan memiliki integritas. Pemerintah memiliki pengendalian internal, yang berarti pemerintah bertanggung jawab untuk memantau aktivitas yang dilakukan dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Selain itu, pengendalian internal dalam COSO adalah proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan terhadap pencapaian tujuan organisasi, yang mencakup pengend

Dalam penelitian oleh Goo and Lamawitak (2021) menyatakan pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berdasarkan pembahasan penelitian tersebut yang menyatakan bahwa sistem akuntansi yang di dalamnya mengatur tentang pengendalian internal, artinya bahwa kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya pengendalian internal yang dimiliki pemerintah daerah.

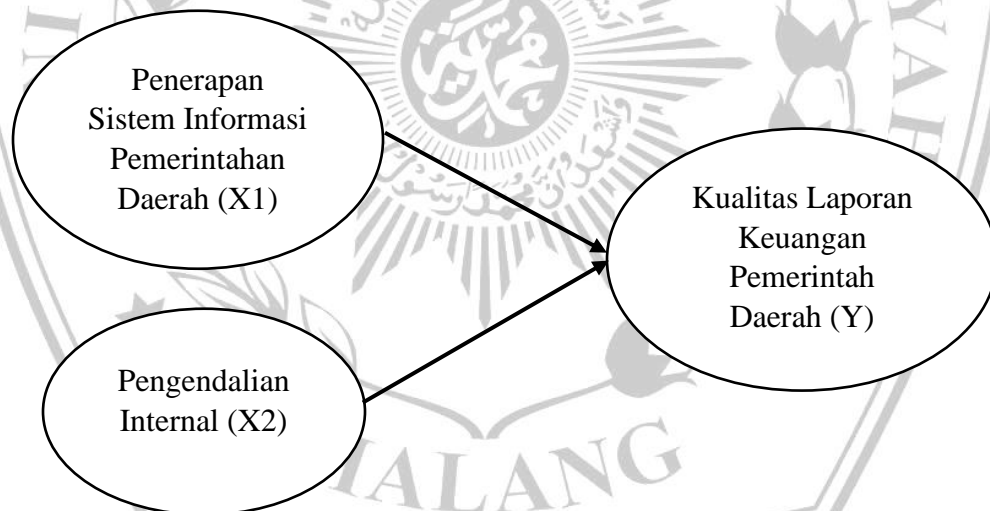
Maka dari itu, kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh suatu pengendalian internal yang baik dan juga sebagai mekanisme

kontrol dalam proses pengelolaan keuangan, sehingga kualitas laporan keuangan yang diamanatkan kepada pemerintah daerah oleh masyarakat dapat tercapai dan dapat diandalkan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini hipotesis yang dapat disampaikan bahwa :

H_2 = Pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.7 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan deskripsi pengembangan hipotesis diatas maka kerangka pemikiran pada gambar 2.7 penelitian ini adalah :



Gambar 2.7: Kerangka Pemikiran